

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN TARUNA SIAGA BENCANA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN GRESIK

Mutiara Firrizqi¹, Lukman Arif²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur ^{1,2}

Email: Firrizqimutiara18@gmail.com¹, lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id²

Abstract

Indonesia is a country that is prone to disasters, one of which is floods which can cause loss and loss of life. In Gresik Regency, the flood disaster occurred due to the overflow of the Lamong River and high rainfall, causing several villages in the sub-district to be flooded. To overcome this, it is necessary to have a policy in disaster management, namely through the TAGANA team. This policy is a synchronization between the Minister of Social Affairs and the Social Service to create a community-based TAGANA team in disaster management, so that the community has the opportunity to play a role in mitigating disasters. The aim of this research is to describe the implementation of the policy of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia regarding disaster preparedness cadets in disaster management in Gresik Regency. This research uses qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The technique for determining informants uses a purposive sampling technique by considering the sources as informants who know the problem so that the data obtained produces quality data. In this research, researchers used George C. Edward III's theory with four indicators, namely communication, resources, disposition, resources and bureaucratic structure. The results of this research explain that the implementation of TAGANA in dealing with the Gresik Regency disaster can be said to have gone well in terms of communication between TAGANA members and the community and with other agencies, the willingness and responsibility of TAGANA members in carrying out their duties, human resources and adequate infrastructure. However, with minimal budget resources, TAGANA's disaster mitigation process was less than optimal.

Keywords: Policy Implementation, TAGANA, Disaster

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang rawan mengalami bencana, salah satunya bencana banjir yang dapat menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Pada Kabupaten Gresik bencana banjir terjadi akibat meluapnya Kali Lamong dan curah hujan yang tinggi, sehingga menimbulkan beberapa desa di kecamatan terendam banjir. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka diperlukan adanya kebijakan dalam penanggulangan bencana yaitu melalui tim TAGANA. Kebijakan tersebut merupakan sinkronisasi antara Menteri sosial dengan Dinas Sosial untuk mewujudkan tim TAGANA yang berbasis masyarakat dalam penanggulangan bencana, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam melakukan mitigasi bencana. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Menteri Sosial Republik Indonesia

tentang taruna siaga bencana dalam penanggulangan bencana Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menganggap narasumber sebagai informan yang mengetahui permasalahan tersebut sehingga data yang diperoleh menghasilkan data yang berkualitas. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari George C. Edward III dengan empat indikator yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi TAGANA dalam menanggulangi bencana Kabupaten Gresik dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dari segi komunikasi antara anggota TAGANA dengan masyarakat maupun dengan instansi lain, kemauan serta tanggungjawab anggota TAGANA dalam melaksanakan tugas, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang sudah memadai. Namun, dengan sumber daya anggaran yang minim sehingga dalam proses mitigasi bencana oleh TAGANA menjadi kurang maksimal.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, TAGANA, Bencana

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia yang sering terkena berbagai bahaya (Arif Lukman, 2020), terletak geografis diantara tiga lempeng yakni lempeng Pasifik, lempeng Indonesia-Australia dan lempeng Eurasia. Selain itu, Indonesia juga berada di *ring of fire* yaitu jalur gunung berapi yang membentang mengelilingi cekungan Pasifik. Keadaan tersebut menjadikan Indonesia rawan mengalami bencana alam. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 2.754 bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam periode 1 Januari-4 September. Sehingga menjadikan 4,2 juta orang menderita dan harus mengungsi, 5.552 orang mengalami luka-luka, sebanyak 199 orang meninggal, dan 10 orang hilang.

Akibatnya 3.358 rumah mengalami kerusakan berat, 3.690 kondisi rusak sedang dan rusak ringan sebanyak 17.687. Selanjutnya, terdapat kerusakan fasilitas umum sebanyak 704 diantaranya, 339 fasilitas pendidikan, 313 peribadatan dan 52 fasilitas kesehatan. Salah satunya di dominasi oleh bencana banjir yang terjadi sebanyak 855 kali, 508 hutan dan lahan terbakar, 443 tanah longsor, 22 gempa bumi, 64 kekeringan, serta 2 kali terjadi erupsi gunung berapi.



Gambar 1. Data Bencana Indonesia 2023
(Sumber: BNPB)

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24 mengenai Penanggulangan Bencana, bahwa bencana merupakan “suatu peristiwa yang mengancam dan meresahkan kehidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam, non alam dan faktor manusia. Faktor alam terjadi tanpa adanya campur tangan manusia, sedangkan faktor non alam dapat terjadi bukan karena fenomena alam itu sendiri, maupun campur tangan manusia.

Faktor manusia terjadi karena adanya campur tangan dan ulah manusia itu sendiri yang menyebabkan kerusakan. Dan dapat menyebabkan korban jiwa, kerugian materil, kerusakan lingkungan hingga dampak psikologis. Maka dari itu, diperlukan kesiapan masyarakat yang tanggap menghadapi bencana, untuk meminimalisir korban jiwa. Bencana dapat menyerang kapan saja, dan dimana saja. Hampir tiga

juta orang terbunuh dalam 20 tahun terakhir akibat bencana alam (Arif Lukman, 2020).

Peluang bencana alam di Jawa Timur di perkirakan masih sangat tinggi. Menurut data BPS terdapat beberapa bencana yang terjadi hingga 26 Juli 2023, yakni 2 gempa bumi pada Kabupaten Lumajang dan Situbondo. 1 letusan gunung api di Kabupaten Lumajang. Selanjutnya 56 tanah longsor pada Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, banyuwangi, Situbondo, Pasuruan, Magetan, Bojonegoro, Kota Malang dan Batu.

Selain itu bencana banjir juga terjadi sebanyak 153 kali. Adapun daerah daerah yang rawan mengalami banjir yakni Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan dan Gresik. Salah satu fenomena alam banjir yang sering terjadi dan menimbulkan banyak korban, fenomena ini dapat dikontrol namun tidak dapat dicegah.

Banjir merupakan keadaan daratan terendam yang disebabkan volume air yang cukup tinggi atau meningkat. Banjir dapat terjadi disebabkan curah hujan yang meningkat dengan kondisi wilayah yang rendah (Rizkiah et al., 2022). Hal ini disebabkan karena kemampuan tanah yang tidak bisa menyerap air secara maksimal. Adanya bencana banjir dapat mengganggu aktivitas masyarakat, dan dapat merusak infrastruktur yang akan berdampak pada perekonomian masyarakat dan menimbulkan korban jiwa (Annafilah et al., 2022).

Menurut kajian inARISK menyatakan bahwa Kabupaten Gresik merupakan daerah yang rawan terjadi bencana banjir dari kategori sedang hingga tinggi, serta luas bahaya sekitar 65.256 hektar dengan jumlah 18 kecamatan. Banjir yang terjadi pada Kabupaten Gresik disebabkan oleh kerusakan pada tanggul yang mengakibatkan Kali Lamong meluap sepanjang 15 meter, kejadian tersebut membuat beberapa desa di kecamatan terendam banjir. Desa tersebut yakni 6 Desa di Kecamatan Benjeng, 7 Desa di Kecamatan Balongpanggang, 3 desa di

Kecamatan Menganti, dan 5 Desa di Kecamatan Cerme.

Tantangan serta permasalahan yang dihadapi Kabupaten Gresik pada saat ini adanya potensi banjir yang seringkali terjadi. Maka, pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Sosial berupaya untuk menghadapi ancaman bencana, baik dari segi kelembagaan maupun segi sumber daya melalui Taruna Siaga Bencana (TAGANA), hal tersebut merupakan salah satu kebijakan yang diputuskan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29. TAGANA dibentuk untuk menyikapi rancangan penanggulangan bencana, dengan menganggap masyarakat tidak hanya sebagai objek namun juga sebagai subjek dalam meminimalisir resiko bencana.

Pada saat melaksanakan mitigasi TAGANA memiliki tiga fase yakni pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana (Irtanto, 2022). Pada saat pelaksanaannya dibutuhkan komunikasi, dan kerjasama yang seimbang antara TAGANA dan instansi pemerintahan (Bram Ronald Sanjaya, Kristiyono, 2019). Dalam menanggulangi bencana, TAGANA Kabupaten Gresik mengalami kendala pada anggaran kegiatan yang minim, sementara dalam prosesnya diperlukan anggaran yang besar untuk melaksanakan kegiatan mitigasi dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Pada masa tanggap darurat, penanggulangan bencana oleh TAGANA yakni membuka dapur umum.

Terdapat bantuan lain dari KEMENSOS seperti, makanan siap saji, selimut, *family kit*, dan *kidware*. Selain itu, ada beberapa bantuan dari organisasi masyarakat seperti sembako untuk warga terdampak. Dengan adanya TAGANA pemerintah berharap agar partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam ikut serta menanggulangi dan meminimalisir dampak dari bencana yang terjadi.

Dari uraian yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan tentang Taruna Siaga Bencana dalam mengatasi bencana, khususnya di Kabupaten Gresik dari segi komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan

TAGANA dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Gresik secara rinci.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif merupakan penelitian naturalistic karena penelitian yang dilakukan bersifat alamiah. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti permasalahan yang memiliki sifat sementara, karena suatu saat akan berubah dan menyesuaikan dengan situasi yang ada. Penelitian terkait implementasi kebijakan Tagana (Taruna siaga bencana) menggunakan jenis metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif.

Dengan menggunakan teori dari Edward III yang memiliki empat indikator yakni komunikasi, struktur organisasi, disposisi, dan sumber daya. Implementasi kebijakan dibuthkan karena munculnya suatu permasalahan dalam kebijakan yang perlu dipecahkan. Empat indikator tersebut saling berkorelasi, sehingga untuk mencapai keefisienan implementasi perlu dilakukan pendalaman secara intensif.

Tujuan dari penelitian ini untuk dapat mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Peraturan Taruna Siaga Bencana Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Gresik. Pengambilan data dengan menggunakan teknik wawancara observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan sumber data dalam penelitian, dengan menganggap narasumber sebagai informan yang mengetahui permasalahan tersebut sehingga data yang diperoleh menghasilkan data yang berkualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TAGANA merupakan masyarakat yang menjadi relawan sosial dengan kepedulian yang tinggi serta aktif dalam membantu penanggulangan bencana. Tujuan dari TAGANA untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menanggulangi bencana (Yuda Ery Kaswara, 2020),

mengajak masyarakat untuk memahami kemampuan diri dan lingkungan mengenai kerawanan bencana, mengadakan sosialisasi untuk melestarikan, menjaga lingkungan hidup serta pemahaman mengenai bahaya, dan siklus bencana yang dapat terjadi .

Yang terdiri dari tiga fase meliputi pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Dalam melakukan kegiatannya TAGANA memiliki beberapa prinsip, yakni prinsip nilai kemanusiaan yang merupakan landasan dalam berorganisasi dan melaksanakan kegiatan. Prinsip sasaran dan kebutuhan masyarakat, hal ini sebagai dasar keberadaan organisasi dan penyediaan kegiatan.

Prinsip totalitas organisasi, selanjutnya yakni prinsip tujuan organisasi, karena setiap orgaisasi wajib mempunyai tujuan yang jelas untuk diwujudkan bersama. Prinsip, komunikasi merupakan sarana penghubung antar anggota, adanya komunikasi yang terbuka sangat dibutuhkan agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Prinsip pengorganisasian yakni setiap pelaksanaan pekerjaan harus distrukturkan. Prinsip perencanaan, merupakan prinsip yang sangat berguna bagi pengembangan dalam kegiatan organisasi.

Prinsip kepemimpinan, pemimpin merupakan aspek utama dalam organisasi karena memegang tanggungjawab dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian prinsip tanggungjawab profesional, dengan adanya pengurus yang bertanggungjawab profesional maka akan terselenggara kegiatan yang berkualitas. Prinsip hubungan yang memiliki tujuan antara organisasi internal dan eksternal.

Prinsip partisipasi sebagai unsur penting dan berkesinambungan., selanjutnya prinsip pendelegasian, prinsip koordinasi, prinsip penggunaan sumber daya, baik berupa sarana prasarana, uang, dan fasilitas lainnya yang dimanfaatkan secara baik dan tepat. Serta prinsip perubahan yang dapat terjadi secara terus menerus dalam organisasi maupun masyarakat.

TAGANA merupakan kebijakan dari Menteri Sosial yang termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana yang berisi

maksud, tujuan, ruang lingkup, tugas, fungsi dan kedudukan dari TAGANA.

Kedudukan TAGANA berada dibawah Dinas Sosial yang bertanggungjawab kepada Menteri Sosial dalam melaksanakan mitigasi bencana. Adapun tugas TAGANA yakni dibagi tiga sesuai dengan tahapan dalam mitigasi. Tugas TAGANA pada saat pra bencana yakni, melakukan pemetaan daerah rawan bencana, membentuk kampung siaga bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, dan melakukan evakuasi dengan pihak terkait.

Selanjutnya pada saat bencana tugas TAGANA yakni, melaksanakan evakuasi penyelamatan korban, pendataan terhadap korban bencana, melakukan operasi pada bidang yang dijalankan seperti, dapur umum, logistik, serta psikososial, melakukan mobilisasi dan tanggap darurat lainnya. Pada pasca bencana TAGANA masih dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya, yakni mendafta kerugian, kerusakan yang disebabkan oleh bencana tersebut, melakukan pemulihan sosial dan melakukan pendampingan advokasi sosial.

Selain itu sejarah TAGANA berawal dari kisah “mobil rongsokan”, karena pada saat terjadi banjir di ibukota bantuan yang diberikan disalurkan menggunakan mobil rongsokan. Selanjutnya pada rapat Jambore Nasional PB Cibubur memperoleh hasil deklarasi 20 Desember 2004, dengan mengembangkan jumlah TAGANA di seluruh wilayah Indonesia dari kegiatan pemantapan TAGANA melalui pemerintah pusat dan daerah.

Pada tahun 2006 di Lembang melalui pertemuan penggiat kemanusiaan pedoman TAGANA disusun. Pada tahun 2012 Kemensos menerbitkan Permensos No.28 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana dan Permensos No.29 Tahun 2019 Tentang Pedoman Taruna Siaga Bencana. Selanjutnya diadakan pengembangan TAGANA *training centre* di Sentul dan pembentukan markas komando TAGANA di TTC pada tahun 2013 dan 2015.

Pada Kabupaten Gresik angkatan pertama TAGANA berdiri tahun 2006, dengan jumlah anggota 38 orang di tahun 2023 yang tersebar pada kecamatan Gresik. Dengan syarat calon anggota TAGANA merupakan warga negara Indonesia, berusia 18 tahun sampai 45 tahun, sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan fokus penelitian menurut Edward III, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni komunikasi, disposisi, struktur organisasi, dan sumber daya. Keempat indikator tersebut saling berkaitan, sehingga apabila terdapat kekurangan, maka akan mempengaruhi indikator lainnya.

a. Komunikasi yakni proses dalam penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan yang ditujukan kepada pelaksana kebijakan. Hal ini harus ditujukan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami tujuan, arah, dan sasaran kebijakan yang dibuat, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Maka, salah satu cara kebijakan dapat dikomunikasikan dengan baik yakni dengan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut secara menyeluruh dan berkelanjutan (Silmi et al., 2019). Sebagai masyarakat perlu adanya antisipasi untuk mengurangi



Gambar 2. Sejarah TAGANA

(Sumber: @kemensosri)

Awal TAGANA dibentuk pada tahun 2002 untuk menyikapi rancangan bangun sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan adanya pertemuan yang menghasilkan deklarasi 25 Maret 2004 di Lembang. Sementara pada saat itu bencana tsunami terjadi di Aceh pada tahun 26 Desember 2004. Sehingga, TAGANA dibentuk sebelum terjadinya tsunami Aceh.

resiko bencana melalui kemampuan menghadapi bencana serta pembangunan fisik karena bencana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Menurut Edward III terdapat tiga aspek dalam komunikasi (Wiranto & Tulis, 2023) untuk melihat komunikasi tersebut telah berjalan dengan baik atau tidak. Indikator tersebut yakni konsistensi, kejelasan, dan transmisi. Pada aspek transmisi menyatakan bahwa kebijakan dari KEMENSOS mengenai TAGANA dapat disampaikan pada anggota TAGANA sebagai pelaksana lapangan. Masyarakat sebagai objek sasaran dan Dinas Sosial sebagai salah satu instansi yang berkorelasi dengan kebijakan tersebut. Sehubungan dengan ini KEMENSOS yang membuat kebijakan mentransmisikan kebijakan TAGANA melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga Bencana yang memuat ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi. Pada aspek konsistensi menyatakan bahwa kebijakan TAGANA yang ditransmisikan kepada anggota TAGANA, masyarakat, dan Dinas Sosial agar dilakukan secara konsisten. Aspek ini dibuktikan dengan adanya kontribusi kemampuan serta kemauan yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini konteks komunikasi digunakan agar implementasi kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia Tentang Peraturan Taruna Siaga Bencana dapat berjalan dengan baik. Apabila diamati pada proses komunikasi yang telah dilaksanakan oleh KEMENSOS yang mentransmisikan kepada Dinas sosial sebagai pihak terkait, anggota TAGANA sebagai pelaksana, dan masyarakat sebagai sasaran sudah efektif karena telah memenuhi tiga aspek komunikasi. Selain itu, komunikasi dilakukan melalui kegiatan berupa sosialisasi pada lingkungan sekolah mengenai mitigasi bencana. Dengan adanya sosialisasi yang sering dilakukan dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi mengenai

- kebencanaan, dan peningkatan kesadaran bagaimana pentingnya penanggulangan bencana bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjaga alam dan lingkungan sekitar.
- b. Selanjutnya, disposisi kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak dapat ditentukan dari sejauh mana pengetahuan pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, namun ditentukan juga oleh kemauan para pelaku kebijakan yang memiliki disposisi kuat terhadap kebijakan tersebut (Wiranto & Tulis, 2023). Sikap pelaksana kebijakan merupakan sesuatu hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kebijakan, maka hal tersebut memiliki hubungan erat dengan kemampuan serta kemauan kerja para pelaksana kebijakan. Adanya komitmen yang tinggi para pelaksana kebijakan menjadikan implementator memiliki antusias terhadap tugas, wewenang, fungsi, dan tanggungjawab yang sedang dilaksanakan. Selain itu, sikap jujur merupakan salah satu sikap untuk tetap berada pada kebijakan yang telah ditentukan. Dengan adanya sikap yang baik dan mendukung maka kebijakan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila implementator memiliki sikap yang kurang mendukung, maka kebijakan tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Beberapa faktor yang mempengaruhi disposisi yakni pemahaman, pengetahuan serta seberapa penting masalah tersebut harus diselesaikan, selain itu pengadaan insentif bagi pelaksana merupakan salah satu faktor disposisi. Disposisi yakni keinginan atau kemauan pelaku kebijakan untuk menjalankan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, yakni Dinas Sosial dan tim TAGANA agar menjalankan kebijakan di Kabupaten Gresik dengan baik dan sesuai prosedur. Dinas sosial dan tim TAGANA diharapkan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, namun mempunyai kemauan juga untuk melaksanakan kebijakan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa

disposisi oleh Dinas Sosial dan tim TAGANA pada Kabupaten Gresik sudah efektif. Tim TAGANA selalu mengikuti arahan dari Dinas Sosial sesuai dengan kebijakan dari KEMENSOS meliputi tugas dan fungsinya, sehingga timbul kejelasan antara penanggungjawab dan pelaksana. Selanjutnya dari Dinas Sosial dan tim TAGANA juga memiliki komitmen dan kepedulian yang tinggi, bekerja dengan ikhlas dalam menanggulangi bencana sesuai dengan kebijakan yang ada. Kemauan serta kemampuan tersebut dibuktikan dengan adanya dapur umum, penghijauan, simulasi bencana dan lain-lain.

- c. Kemudian dari segi sumber daya merupakan aspek yang sangat penting sebagai indikator keberhasilan suatu kebijakan implementasi. Pada aspek ini sumber daya biasanya meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sumber daya anggaran. Suatu kebijakan tidak dapat berjalan secara efektif apabila tidak di dukung dengan sumber daya yang kompeten sesuai dengan tugas dan fungsinya (Wiranto & Tulis, 2023). Sumber daya yang dimiliki oleh TAGANA biasanya telah menyelesaikan jenjang pendidikan formal serta memiliki keahlian dalam bidangnya. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan, bahwa sumber daya pada implementasi kebijakan TAGANA Kabupaten Gresik yaitu meliputi sumber daya manusia yang kompeten seperti anggota TAGANA yang telah memiliki pengalaman serta mengikuti pelatihan kebencanaan. Anggota TAGANA Kabupaten Gresik berjumlah 38 orang yang tersebar di 18 kecamatan, dengan komposisi yakni 50% usia produktif dan 50% usia tua, kedepannya akan diadakan perombakan pada komposisi SDM, yang akan dilakukan secara bertahap. Anggota dalam TAGANA dibagi menjadi tiga, pertama yakni TAGANA Muda yang telah selesai mengikuti pelatihan dasar dalam penanggulangan bencana. Kedua TAGANA Madya yang telah mengikuti pelatihan, pemantapan serta memiliki

keterampilan dalam penanggulangan bencana. TAGANA Utama yakni anggota yang telah mengikuti pelatihan, pemantapan, memiliki keterampilan serta berpengalaman dalam lingkup regional dan nasional. Sumber daya lain adalah sarana prasarana yang mampu membantu kelancaran dan keefisienan mitigasi bencana yang dapat menunjang proses mitigasi, yakni sarana prasarana yang telah disediakan oleh provinsi dan KEMENSOS untuk aset TAGANA, seperti kendaraan truk, dapur umum beserta peralatan masak, sepeda motor operasional seperti KLX dan Verza. Selain itu, TAGANA bersama Dinas Sosial Gresik juga menyediakan dapur umum. Beberapa hal yang dibutuhkan dapur umum dapat disalurkan dari donatur melalui bantuan logistik, biasanya berupa bahan pokok seperti, beras, mie instan, telur dan lain-lain. Dalam pembentukan dapur umum sudah cukup efektif, karena beberapa kebutuhan pengungsi telah terpenuhi dengan baik. Kemudian, TAGANA juga mendirikan posko evakuasi dan perlengkapan, pada saat terjadi bencana maka dibutuhkan tenda pengungsian sebagai fasilitas pemukiman sementara. Dalam pendirian posko pengungsian dapat menggunakan tempat ibadah, rumah penduduk atau membangun tenda khusus, namun memenuhi standar kelayakan. Pada posko evakuasi dibutuhkan stok air dan penerangan yang memadai, terdapat bantuan lain dalam posko evakuasi seperti pakaian yang layak pakai untuk para pengungsi karena terdapat korban yang telah kehilangan harta benda nya pada saat terjadi bencana. Selain itu adanya tenda darurat yang menyediakan fasilitas medis seperti obat-obatan dan peralatan medis. Sarana prasarana tersebut memiliki fungsi yang dapat mempermudah proses kerja, mempercepat, dan meningkatkan produktivitas sehingga memperoleh suatu kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya pada sumber daya anggaran, TAGANA Kabupaten Gresik bersumber dari

anggaran pemerintah Kabupaten Gresik yang disalurkan kepada BPBD untuk TAGANA. Namun pada sumber daya anggaran terdapat kendala karena anggaran yang disediakan sangat minim. Sementara dalam proses mitigasi membutuhkan anggaran yang besar mulai dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Menurut Bapak Edo selaku pengurus TAGANA Kabupaten Gresik, anggaran TAGANA pada tahun 2023 dibagi menjadi tiga sub kegiatan, pertama yakni rapat koordinasi kesiapsiagaan yang dihadiri oleh seluruh anggota TAGANA serta Dinas Sosial, sosialisasi, dan pelaksanaan TAGANA dengan anggaran sebesar Rp 36.143.000. Kedua yakni dipergunakan untuk layanan dukungan psikososial sebesar Rp 13.335.000. Ketiga, digunakan untuk menyediakan makanan bagi korban bencana sebesar Rp 50.000.000. Maka, total anggaran keseluruhan TAGANA pada tahun 2023 berjumlah Rp 99.478.000. Pada aspek sumber daya telah memadai namun ada baiknya tetap dilakukan peningkatan, dengan adanya pelatihan kepada anggota TAGANA melalui kegiatan pembekalan. Selain itu, perlunya peningkatan dalam memanfaatkan sarana prasarana yang di inventarisasi kepada tim TAGANA agar tetap digunakan dengan sesuai. Dari segi anggaran perlunya peningkatan kerjasama antara TAGANA, Dinas Sosial, dan BPBD agar dalam proses mitigasi bencana anggaran yang diperlukan dapat terpenuhi sesuai rencana.

- d. Pada struktur birokrasi menurut Edward tidak efisiennya struktur birokrasi dapat menjadikan implementasi kebijakan tidak efektif. Struktur birokrasi meliputi beberapa aspek seperti pembagian kewenangan, dan hubungan organisasi yang satu dengan lainnya, hal ini berdampak pada implementasi kebijakan (Setyawan et al., 2019). Maka dari itu, dalam struktur birokrasi terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) atau mekanisme yang dapat mempermudah serta menyamakan

tindakan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan bidang, fungsi dan tugasnya. Selanjutnya yakni struktur birokrasi, apabila struktur birokrasi tersebut terlalu panjang maka pengawasan akan menjadi lemah, dan prosedur menjadi kompleks dan rumit yang menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Hasil penelitian menjelaskan bahwa struktur birokrasi pada pelaksanaan kebijakan TAGANA Kabupaten Gresik dilakukan secara efektif dapat dilihat dari adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga Bencana. Selanjutnya, tugas dan fungsi anggota TAGANA telah bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Selain itu, tim TAGANA, akan tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan para pelaksana lain yakni BPBD dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Peraturan Taruna Siaga Bencana Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Gresik dengan mengacu pada teori Edward III. Maka dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan kebijakan TAGANA dari empat aspek tersebut antara lain:

- a. komunikasi antara TAGANA sebagai pelaksana lapangan, masyarakat sebagai sasaran, serta Dinas Sosial sebagai pihak instansi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut terjalin cukup baik. Selain itu, komunikasi antara TAGANA dan masyarakat juga dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana pada tiap desa dan lingkungan sekolah.
- b. Pada aspek disposisi dinilai sudah cukup baik dilihat dari komitmen serta kepedulian yang tinggi, tanggungjawab, dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan aturan.

- c. Selanjutnya sumber daya yang terbagi menjadi tiga yakni sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Sumber daya manusia TAGANA Kabupaten Gresik cukup baik karena telah mengikuti beberapa pelatihan dan memiliki pengalaman yang cukup dalam mitigasi bencana. Sarana prasarana yang disediakan untuk menunjang kegiatan mitigasi sudah memadai, dengan adanya sarana prasarana yang telah memadai maka proses mitigasi dapat berjalan dengan baik. Namun, pada sumber daya anggaran masih kurang karena dalam proses mitigasi membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses mitigasi.
- d. Struktur birokrasi pada instansi yang berkaitan dan TAGANA berjalan dengan baik dari Dinas Sosial dan BPBD saling berkoordinasi dan telah melakukan tugas sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.
- Bram Ronald Sanjaya, Kristiyono, Y. K. W. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Taruna Siaga Bencana (Tagana) Di Provinsi Bali*. 31–37.
- Desriman, & Frinaldi, A. (2023). *Work Culture And Public Communication Of The Mentawai Islands Tagana In Disaster Management*. 1(1), 156–163.
- Findayani, A. (2015). Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Semarang. *Jurnal Geografi*, 12(1), 103–114.
- Irtanto. (2022). Evaluasi Peran Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanggulangan Bencana Alam. *Jurnal Litbang Kebijakan*, 16(2), 105–123.
- Peraturan Menteri Sosial Ri. (2012). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Tagana. *Menteri Sosial Republik Indonesia*, 2008, 1–13.

DAFTAR PUSTAKA

- Annafilah, A. A., Hasanah, N., Kurniawati, I., Diniyah, A., Isnaini, S., & Azizah, L. N. (2022). *Proceeding Science Education National Conference 2022 Program Studi Pendidikan Ipa Universitas Trunojoyo Madura Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Bencana Banjir Di Daerah Pesalakan, Kabupaten Bangkalan*. 187–196.
- Arif Lukman. (2020). Mitigasi Bencana Gempa Di Kota Surabaya (Kajian Tentang Upaya Antisipatif Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mengurangi Resiko Bencana). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10, 87–100.
- Bayquni. (2019). Efektivitas Satuan Taruna Tanggap Bencana (Tagana) Kementerian Sosial Ri Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana Di DKI Jakarta. *Public Administration Journal*, 3(2), 145–157.
- Peraturan Menteri Sosial Ri. (2012). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga Bencana. In *Menteri Sosial Republik Indonesia*. <http://www.bphn.go.id/Data/Docuents/14pmsos008.pdf>
- Rizkiah, R., Poli, H., & Supardjo, S. (2022). Penanganan Banjir Pada Permukiman Padat Penduduk Sepanjang Sub Das Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 105–112. <https://doi.org/10.20527/jgp.v3i2.6917>
- Setyawan, D., Adithama, M. O., Studi, P., Administasi, I., & Tunggadewi, U. T. (2019). Melalui Program Smart Di Kelurahan Sisir Kota Batu Email :

Dody.Setyawan@Unitri.Ac.Id. *Jurnal Reformasi*, 9(1), 22–30.

Silmi, N. R., Nur, T., & Purwanti, D. (2019). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kota Sukabumi. *Joppas: Journal Of Public Policy And Administration Silampari*, 1(1), 30–40. <https://doi.org/10.31539/Joppa.V1i1.800>

Siswanto, R. D., & Puspaningtyas, A. (2023). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Dan Mitigasi Banjir Di Kabupaten Gresik*. 2(1), 21–31.

Wiranto, & Tulis, R. S. (2023). Jurnal Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*. *Jurnal Administrasi Publik*, 1x, 28–40.

Yuda Ery Kaswara. (2020). Efektivitas Organisasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Permukiman Penduduk Di Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 219–232. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/02/Jurnal_Yuda_Ery_Kaswara_\(02-27-20-11-52-59\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/02/Jurnal_Yuda_Ery_Kaswara_(02-27-20-11-52-59).pdf)